



RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2024  
DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jl. Mejobo Komplek Perkantoran Telp. (0291) 437711 Fax. 437711



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus

Telp / Fax. (0291) 438177, 437711

KUDUS 59319

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA**

Nomor : 800/1980 /13.01 / 2023

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN DESA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan program Perangkat Daerah dalam tahun belanja dengan perkembangan keadaan, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  - b. bahwa guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Kudus dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Perencanaan Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Perencanaan Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kudus.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengumpulkan data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan guna penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ;
  - b. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ;
  - c. merumuskan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ;
  - d. menyajikan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ;
  - e. menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
Pada Tanggal

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKA DAN DESA

ADI SADHONO MURWANTO



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus ;
2. Kepala Bappeda;
3. Kepala Inspektorat.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Kudus  
Nomor : 800/1780/13.01/2023  
Tanggal : 3 Juni 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Bidang Pemerintahan Desa Kepala Bidang Pemerintah Desa	Ketua Kelompok Bidang Pemerintahan Desa
4.	Kasi Pemerintahan Desa dan BPD	Anggota
5.	Kasi Kerjasama Desa dan Informasi Desa	Anggota
6.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Kelompok Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7.	Kasi Usaha Ekonomi Masyarakat	Anggota
8.	Kasi Kelembagaan Masyarakat	Anggota
9.	Kasi Sumber Daya Lingkungan, Teknologi dan Inovasi	Anggota
10.	Bidang Keuangan dan Aset Desa Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa	Ketua Kelompok Bidang Keuangan dan Aset Desa
11.	Kasi Keuangan Desa	Anggota
12.	Kasi Aset Desa	Anggota
13.	Sekretariat	
14.	Kasubbag PEP & Keuangan	Ketua Tim Kesekretariatan
15.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kudus

Pada Tanggal 3 Juni 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA,

ADI SADHONO MURWANTO



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Atas ridho dan bimbingan Allah SWT dengan usaha keras, kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi serta kesungguhan dan keikhlasan yang dalam didukung oleh stake holder yang ada, kami berkeyakinan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dapat mewujudkan cita cita bersama yang tertuang dalam Renja ini.

Akhirnya kami berharap Renja ini dapat menjadi motivator bagi jajaran personil Kabupaten Kudus dan stake holder yang ada untuk mewujudkan masyarakat Kudus yang semakin sejahtera.

Kudus,  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA

**Drs. ADI SADHONO MURWANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681202 198803 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah
- 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dess
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB V PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

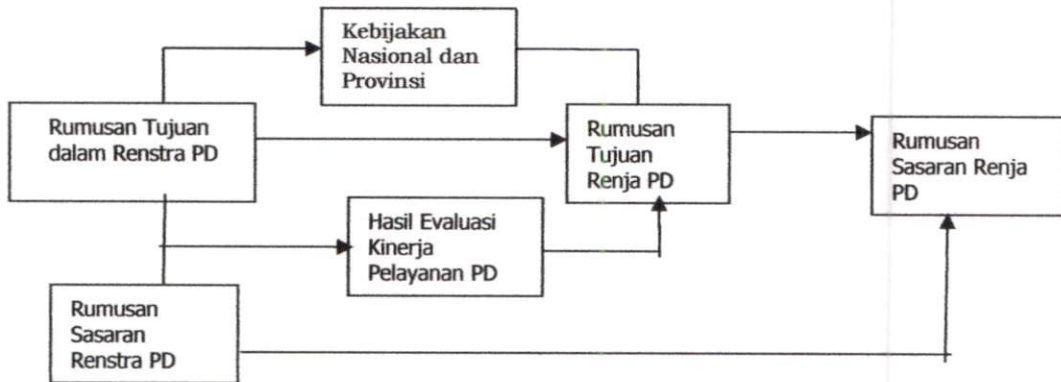
### **1.1 Latar Belakang**

Tahun 2024 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026. Sebagai bentuk penjabaran RPD kabupaten Kudus maka untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 disusun melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKOD) tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan daerah periode 1 (satu) tahun atau rencana pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini mengacu pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara rinci penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

**Gambar 1.1**

**Hubungan Renstra SKPD dengan Renja SKPD**



**1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2024 berpedoman pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun dengan dilakukan elaborasi terhadap Inmendagri No. 52 Tahun 2022

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan maksud mencapai keselarasan perencanaan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar selaras dengan lingkungan internal dan eksternal yang ada di Kabupaten Kudus, sehingga implementasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta akuntabel.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai arahan dan strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah
- 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dess
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PMD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD**

Secara umum dalam waktu satu tahun terakhir ini sebagian besar program maupun kegiatan dapat dikategorikan mencapai target dan sasaran yang ditentukan berdasar indikator kinerja yang ada. Namun demikian juga terdapat beberapa target kinerja yang belum dapat berhasil secara optimal akibat beberapa faktor pengaruh. Guna mendeskripsikan keberhasilan pencapaian target serta faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus maka dilakukanlah analisis dan evaluasi dengan mengacu pada target dan indikator kerja yang tertuang dalam RKPD dan melihat hasil realisasi masing-masing program dan kegiatan. Evaluasi program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama satu tahun terakhir tersebut dapat diurai sebagai berikut :

- a. Realisasi program / kegiatan / sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :
  1. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu tidak dapat terealisasi karena merupakan sub kegiatan baru sehingga tidak dapat terserap sepenuhnya
  2. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa belum memenuhi target karena tidak ada perubahan regulasi terkait perencanaan desa hal ini disebabkan Pemerintah Desa masih menggunakan aturan sebelumnya sehingga tidak ada permintaan fasilitasi pemdes melaksanakan perencanaan desa sesuai regulasi Tahun sebelumnya.



3. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa belum bisa terserap sepenuhnya dikarenakan kegiatan Musdes sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan tahapannya
  4. Demikian pula sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa karena indeks SSH terlalu tinggi sehingga sisa anggaran cukup besar meskipun volume terpenuhi.
- b. Realisasi program / kegiatan / sub kegiatan yang telah memenuh terpenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, lebih dari 80%
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, NIHIL
- d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target/kinerja program kegiatan :
1. Merupakan sub kegiatan baru yang harus dipelajari lebih dalam.
  2. Regulasi yang berubah mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan masih menggunakan aturan lama sehingga penyerapan tidak optimal
  3. SSH yang terlalu tinggi mengakibatkan sisa anggaran cukup besar meskipun volume terpenuhi
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah :
1. Kegiatan terlaksana akan tetapi tidak sesuai target
  2. Perubahan regulasi mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai perencanaan

3. Tingginya SSH mengakibatkan sisa anggaran sehingga mempengaruhi penyerapan
- f. Sedangkan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada demi memenuhi target kinerja yang ada meliputi :
1. Koordinasi dan mempelajari sub kegiatan baru
  2. Konsultasi terkait perubahan regulasi
  3. Konsultasi terkait SSH
  4. Mencermati anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
  5. Mengoptimalkan SDM yang ada

Dalam penyusunan Renja 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra), tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2024.

Pengertian kinerja itu sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tabel T-C.29  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2022  
 Kabupaten Kudus

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome / Kegiatan (Output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022	
					Target Kinerja Capaian Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9=5+7	10=9/4
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah	85	78,50	83,5	82,59	98,91	82,59	97,16%
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 Dokumen	100%

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022	
					Target Kinerja Capaian Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9=5+7	10=9/4
2.13.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
2.13.01.2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022	
					Target Kinerja Capaian Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9=5+7	10=9/4
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
2.13.01.2.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
2.13.02	Program Penataan Desa	Terselenggarakan nya Program Penataan Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa		100%		100%
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggarakan nya Program Penataan Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa		100%		100%

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022	
					Target Kinerja Capaian Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9=5+7	10=9/4
2.13.03	Program peningkatan kerjasama desa	Terlaksananya Program peningkatan kerjasama desa	1 Produk Hukum	Hukum	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%	1 Produk Hukum	100%
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Produk Hukum Kawasan Pedesaan	1 Produk Hukum	Hukum	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%	1 Produk Hukum	100%
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa	123 desa	123 desa	123 desa	123 desa	100%	123 desa	100%

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022	
					Target Kinerja Capaian Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9=5+7	10=9/4
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Produk Hukum tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	14 Produk Hukum	14 Produk Hukum	14 Produk Hukum	14 Produk Hukum	100%	14 Produk Hukum	100%
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Meningkatnya kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	30%		20%	20%	100%	20%	66,66%



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022	
					Target Kinerja Capaian Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9=5+7	10=9/4
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakata n yang diberdayakan	861 lembaga	861 lembaga	861 lembaga	861 lembaga	100%	861 lembaga	100%

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus yang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama. Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tata laksana Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan Program / Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing –masing dengan mengacu pada standar pelayanan public dan standart oprasional baku (standart optasional procedure / SOP) masing-masing bidang pelayanan. Standar pelayanan publik sebagai salah satu bentuk kongrit upaya –upaya peningkatan pelayanan public yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pencapaian kinerja harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, dan akuntabilitas. Dengan harapan dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel T-C.30 sebagai berikut :

**TABEL T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Kudus**

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2023	2024	
1.	Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa			25%	30%								
2.	Menurunnya persentase desa yang bermasalah			20%	10%								
3.	Persentase peningkatan kawasan pedesaan			75%	100%								
4.	Persentase Desa Mandiri				21%	22%	23%	24%					
5.	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD)				8,13	13,01	17,89	22,76					
6.	Nilai hasil implementasi SAKIP oleh Inspektorat				85	70	71	72					Penilaian Tahun 2022 belum keluar
7.	nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD					115	205	295					Merupakan indikator baru yang dilaksanakan di tahun 2024

NO	Indikator	SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2023	2024	
8.	Persentase desa yang tertata						2%	3%	4%					Merupakan indikator baru yang dilaksanakan di tahun 2024
9.	Persentase desa yang meningkat PADesa yang bersumber dari Kerjasama Desa						10%	15%	20%					Merupakan indikator baru yang dilaksanakan di tahun 2024
10.	Nilai Variabel Pemberdayaan Masyarakat Desa						33	38	45					Merupakan indikator baru yang dilaksanakan di tahun 2024
11.	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)				40	42	44	46	48	42	46	109,52%	100%	

## **2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas PMD**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus menetapkan indikator kinerja periode 2024 - 2026 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis. Karenanya tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Pemerintah Desa dan BPD
  - a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan bimtek aparatur pemerintah desa, bimtek pengelolaan keuangan desa, pelatihan pengelolaan aset desa.
  - b. Pembinaan administrasi desa dengan kelompok sasaran aparatur desa
  - c. Pelayanan pendirian bumdes dengan memberikan sosialisasi dengan kelompok sasaran desa
  - d. Pedoman penyusunan profil desa , kelompok sasaran desa yang belum mempunyai / meng update profil desa
2. Fasilitasi Penataan Desa
  - a. Memberikan fasilitasi tata wilayah desa
  - b. Memfasilitasi sarana dan prasaran desa
3. Pembinaan Kerjasama Desa
  - a. Pembinaan kerjasama desa dan kawasan perdesaaan dengan kelompok sasaran desa – desa yang bergabung dalam kawasan perdesaan.
4. Pembinaan evaluasi perkembangan desa, kelembagaan dan pembangunan
  - a. Pedoman evaluasi perkembangan desa, kelompok sasaran seluruh desa di kabupaten Kudus
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat, kelompok sasaran kelembagaan masyarakat yang ada di desa

**2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas PMD**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kudus sebagaimana berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Tata kelola pemerintahan desa	Belum tertibnya administrasi pemerintahan Desa	Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa
			belum tertatanya aset desa
		belum optimalnya sarana prasarana desa	pembangunan infrastruktur belum sesuai kondisi geografis di masing masing desa
		kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa	pembangunan di desa masih bersifat parsial
Kurangnya peran kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan desa	kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa		

**2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas PMD**

**A. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sinergitas sektoral pembangunan di desa;

2. Rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;
3. Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dalam mendukung pembangunan di Desa;

## **B. Peluang**

Peluang Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dispermadesdukcapil pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Alokasi dana untuk pembangunan Desa yang cukup besar memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan peningkatan kapasitas desa, kerjasama antar desa, pengembangan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi desa;
3. Perkembangan IPTEK semakin memudahkan untuk melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan dan informasi desa.

### **2.3.4 Isu Isu Strategis**

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu kurang berkualitasnya pembangunan desa sehingga dibutuhkan strategi yaitu Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas aparatur pemerintah desa. Untuk mengatasi isu tersebut maka dilakukan beberapa kebijakan, diantaranya :

1. Peningkatan pengawasan, pengelolaan administrasi dan integritas aparatur pemerintah desa.
2. Optimalisasi pembangunan sarana prasarana desa
3. Optimalisasi pembangunan kawasan pedesaan
4. Revitalisasi BUMDesa dan optimalisasi peran kelembagaan yang ada di desa

#### **2.4 Reviuw Terhadap Rancangan awal RKPD**

Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel.



Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	PMD	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	44 Nilai	4,811,760,974	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	PMD	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	44 Nilai	6.094.265.154	
2.	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	PMD	Persentasi capaian kinerja sub kegiatan perangkat daerah	100%	11.000.000	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	PMD	Persentasi capaian kinerja sub kegiatan perangkat daerah	100%	88.397.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Administrasi Keuangan Daerah	PMD	Persentasi realisasi anggaran sesuai RKA / DPA/DPPA	87 %	4,261,690,900	Administrasi Keuangan Daerah	PMD	Persentasi realisasi anggaran sesuai RKA / DPA/DPPA	87 %	4.352.085.000	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PMD	Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun	100 %	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PMD	Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun	100 %	25.000.000	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PMD	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran Sesuai Standar	100%	134,300,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PMD	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran Sesuai Standar	100%	152.129.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Pengadaan barang Milik mdaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PMD	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	3 Unit	50.000.000	Pengadaan barang Milik mdaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PMD	Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	100 %	239.285.000	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PMD	Persentasi Pembayaran Jasa Penunjang Kantor Tepat Waktu	3 Laporan	600.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PMD	Persentasi Pembayaran Jasa Penunjang Kantor Tepat Waktu	100 %	457.558.554	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PMD	Persentasi BMD dalam kondisi baik	23 Unit	400.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PMD	Persentasi BMD dalam kondisi baik	100 %	779.830.000	
<b>9.</b>	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>PMD</b>	<b>Persentasi Desa Yang Tertata</b>	<b>123 Desa</b>	<b>1.699.999.000</b>	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>PMD</b>	<b>Persentasi Desa Yang Tertata</b>	<b>2 %</b>	<b>1.886.201.000</b>	
10.	Penyelenggaraan Penataan Desa	PMD	Persentasi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Desa	2%	1.699.999.000	Penyelenggaraan Penataan Desa	PMD	Persentasi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Desa	2%	1.886.201.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	PMD	Persentasi Desa Yang Meningkatkan PADesa yang bersumber dari Kerjasama Desa	2 Produk Hukum	150.000.000	Program Peningkatan Kerjasama Desa	PMD	Persentasi Desa Yang Meningkatkan PADesa yang bersumber dari Kerjasama Desa	10 %	195.000.000	
12.	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	PMD	Jumlah Kerjasama Desa	2 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	PMD	Jumlah Kerjasama Desa	119 Desa	195.000.000	
13.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	PMD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	15 Dokumen	3.850.000.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	PMD	Nilai Rata rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD	115	2.651.387.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PMD	Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihasilkan	15 Dokumen	3.850.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PMD	Nilai Variabel Aset Desa Nilai variabel integritas Pemdes Nilai variabel kelembagaan Pemdes Nilai variabel keuangan desa Nilai variabel perencanaan desa	25 Nilai 20 Nilai 20 Nilai 25 Nilai 25 Nilai	2.651.387.000	
15.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	PMD	Prosentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	100 %	860.000.000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	PMD	Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa	33 Nilai	666.082.190	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.	Pemberdayaan Lembaga  Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PMD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Yang Terfasilitasi	1239 Lembaga	860.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PMD	Nilai lembaga ekonomi desa  Nilai lembaga kemasyarakatan desa  Nilai lembaga sosial budaya, inovasi dan kelompok masyarakatan lainnya	13 Nilai  13 Nilai  7 Nilai	666.082.190	

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN

##### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan nasional

Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Agenda pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 dengan tema pembangunan

**“Pembangunan Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”** adalah meliputi :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
- c. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan.
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- f. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

##### 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Tabel Tujuan Dan Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan desa	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD)	13.01 indeks
2	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi SAKIP PD	70 Nilai



**Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kudus**

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Nilai	44
2.	Program Penataan Desa	Persentasi Desa Yang tertata	%	2
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang meningkat PADesa yang bersumber dari Kerjasama Desa	%	10
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD	Nilai	115
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	nilai variabel kelembagaan masyarakat desa	Nilai	33

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus melaksanakan Program dan kegiatan sebanyak 5 Program, 11 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    9. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemerintah Daerah
  1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  6. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## II. Program Penataan Desa

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa
  - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
  - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

## III. Program Kerjasama Desa

1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
  - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
  - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

## IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
  - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
  - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - e. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
  - g. Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
  - h. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
  - i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
  - j. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
  - l. Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
  - m. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

- n. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- o. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- p. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- q. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
- r. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

- 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
  - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
  - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.
- h.** Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KUDUS  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						11.492.955.404,00								10.061.195.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.492.955.404,00							10.061.195.000,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						11.492.955.404,00							10.061.195.000,00		
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	46 Nilai			44 Nilai	6.094.285.154,00						46 Nilai	4.883.589.000,00		
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	-			100 %	88.397.000,00			Mengemban ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduktif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD	-	8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	43.073.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduktif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				364 Orang/bulan	4.286.525.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berawasannya lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		3.880.589.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	85.580.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berawasannya lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	-			100 %	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwasana lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD	-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwasana lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi 20 JP setahun	-			100 %	25.000.000,00			Mengemb ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	25.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemb ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	-			100 %	152.129.600,00			Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD	-	93.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.499.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	24.992.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	22.499.600,00	Kab. Kudus, Semua Kacamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		11.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	50.004.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	6.629.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	-			100 %	239.285.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwasana lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD	-	156.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diaudikan				2 Unit	74.700.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwasana lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	47.828.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4, Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5, Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		56.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				27 Unit	116.757.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4, Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5, Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	352.267.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD dalam kondisi Baik</i>	-			100 %	779.830.000,00			Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Aparatur PMD	-	290.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	219.208.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Aparatur PMD		115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	525.836.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Aparatur PMD		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														









NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUBAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduusif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Desa		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduusif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Desa		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														









NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN GAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa</i>				16 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Desa		7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0008		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>				3 Dokumen	153.070.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Desa		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0009		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														







NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Desa		65.589.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			<i>Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>				369 Orang	30.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban- gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Desa		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasaan Batas Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Difaasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				5 Desa	150.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berawas lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Desa		270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berawas lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Desa		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diaksanakan oleh Desa</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Desa		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	Masyarakat Desa		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>nilai variabel kelembagaan masyarakat desa</i>	45 Nilai			33 Nilai	666.082.190,00						38 Nilai	661.678.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Nilai lembaga ekonomi desa Nilai lembaga kemasyarakatan desa Nilai lembaga sosial budaya, inovasi dan kelompok masyarakat lainnya</i>	-			13 Nilai 13 Nilai 7 Nilai	666.082.190,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwasana lingkungan dan tahan bencana	masyarakat	-	661.878.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>				2 Dokumen	99.999.980,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwasana lingkungan dan tahan bencana	masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Lembaga	101.541.320,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat		61.678.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Unit	9.899.940,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang konduif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	masyarakat		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	108.641.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	masyarakat		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN GAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>				1 Laporan	36.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat		26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>				1 Dokumen	249.999.950,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwa wasan lingkungan dan tahan bencana	masyarakat		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
<b>JUMLAH</b>								11.492.955.404,00							10.061.195.000,00	



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan. Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten telah merencanakan Program dan Kegiatan Kudus yang akan dilaksanakan sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan di Kabupaten Kudus . Renja Tahun 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Tahun Anggaran 2024. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2024 – 2026.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024.

Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus.

Kudus,  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA



**Drs. ADI SADHONO MURWANTO**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681202 198803 1 002

TIMELINE PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2024  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KEGIATAN	BULAN											
		JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Rapat Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024												
2	Draft Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024												
3	Pembuatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024												
4	Finalisasi Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024												
5	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024												
6	Reviu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 oleh Inspektorat												
7	Penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024												

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

  
**Drs. ADI SATHONO MURWANTO, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19681202 198803 1 002

**LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PERIODE PELAKSANAAN : 2022**  
**TRIWULAN IV**

(\* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11		
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				6.330.339		670.839		1.207.451		1.915.282		1.824.935		5.618.507		88,76	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PMD)	83,5 Indeks		82,49		81,66		84,16		82,59		82,59		98,91		
		Indeks Reformasi Birokrasi	28 Nilai		0		0		0		0		0		0		
<b>X.XX.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			5.000		1.251		0		978		2.771		5.000		100	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12 dokumen		3,00		3,00		2,00		4,00		12		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.500		681		0		171		1.648		2.500		100	
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen		3		0,00		1,00		2,00		6		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.500		570		0		807		1.123		2.500		99,99	
		Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	6 dokumen		2		1,00		1,00		2,00		6		100		
<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			4.650.945		516.510		1.023.184		1.535.450		961.256		4.035.399		86,79	
		Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	12 bulan		3,00		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.550.946		516.510		993.584		1.505.850		927.072		3.943.015		86,64	
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			99.999		0		29.600		29.600		34.184		93.384		93,38	
		Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan		0		5,00		3,00		4,00		12		100		
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.900		0		0		0		9.792		9.792		98,91	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	1 unit		0,00		5,00		-5,00		1,00		1		100		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			9.900		0		0		0		9.792		9.792		98,91	
		Jumlah pengamanan barang milik daerah SKPD	12 bulan		0		0,00		0		12,00		12		100		
		Jumlah pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Unit		0		0,00		0		1,00		1		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			271.428		9.501		15.162		22.047		188.992		235.703		86,84	
		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		3,00		3,00		3,00		3,00		12		100		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		3,00		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			149.257		0		199		1.432		138.861		140.492		94,13	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5 jenis		0		5,00		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.796		2.508		2.877		6.572		5.707		17.664		74,23	
		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	47 jenis		41		4,00		0		2,00		47		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.714		1.058		969		2.358		7.468		11.853		93,23	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 jenis		9		0,00		-3,00		4,00		10		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.946		2.875		1.571		5.612		6.298		16.356		74,53	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TW 4

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8	10=9/4*100	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8	10=9/4*100	11	
		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 jenis		3		1,00		1,00		0		5		100	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.041		0		797		1.173		8.959		10.929		72,66
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	6 jenis		0		4,00		2,00		0		6		100	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.000		900		900		2.250		1.740		5.790		96,5
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tersedia	2 jenis		2		0,00		0		0		2		100	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			9.920		0		0		0		795		795		8,01
																Karena Sub Kegiatan baru, sehingga kesulitan dalam mengumpulkan data dukung
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			32.754		2.160		7.850		2.650		19.164		31.824		97,16
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 hari		20		15,00		40,00		-25,00		50		33,33	
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>464.966</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>149.292</b>		<b>312.486</b>		<b>461.778</b>		<b>99,31</b>
		<b>Terlaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4 Jenis</b>		<b>4,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4</b>		<b>100</b>	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			60.349		0		0		44.286		15.377		59.663		98,86
		Jumlah pengadaan mebel	15 Unit		0		9,00		6,00		0		15		100	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			404.617		0		0		105.006		297.109		402.115		99,38
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit		0		3,00		0		0		3		100	
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>489.409</b>		<b>95.407</b>		<b>108.730</b>		<b>126.616</b>		<b>119.990</b>		<b>450.743</b>		<b>92,1</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100	11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<b>Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 bulan</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>12</b>		<b>100</b>		
		<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>12 bulan</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>12</b>		<b>100</b>		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000		0		500		650		850		2.000		100	
		Jumlah Jasa Surat Menyurat Yang tersedia	1 jenis		0		1,00		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			97.450		16.536		11.970		23.317		26.640		78.464		80,52	
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangb tersedia	12 bulan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	4 jenis		4		0,00		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			389.959		78.871		96.260		102.648		92.500		370.280		94,95	
		Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia	12 bulan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
		Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia	11 orang		11		0,00		0		0		11		100		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>438.692</b>		<b>48.171</b>		<b>60.375</b>		<b>80.899</b>		<b>229.648</b>		<b>419.092</b>		<b>95,53</b>	
		<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 bulan</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>12</b>		<b>100</b>		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			142.644		10.885		24.350		40.176		59.832		135.243		94,81	
		Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan yang tersedia	20 unit		8		2,00		10,00		-20,00		0		0		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250.800		36.851		36.025		37.943		130.962		241.781		96,4	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					i		II		III		IV						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
		Jumlah jasa Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya	5 orang		5		0,00		0		0		5		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45.248		435		0		2.780		38.853		42.068		92,97	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19 Unit		1		9,00		7,00		2,00		19		100		
2.13.02	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>			1.702.069		0		390.113		475.064		577.546		1.442.722		84,76	
		Jumlah TMMD/ Karya bhakti yang dilaksanakan	3 desa		0		1		2		3		3		100		
		Persentase Penyelenggaraan Penatan Desa	100 %		0		0		67		100		100		100		
2.13.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>			1.702.069		0		390.113		475.064		577.546		1.442.722		84,76	
		<i>Terselenggarakannya Penataan Desa</i>	3 desa		0,00		1,00		1,00		1,00		3		100		
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			1.702.069		0		390.113		475.064		577.546		1.442.722		84,76	
		Jumlah TMMD/Karya Bhakti yang dilaksanakan	3 desa		0		1,00		1,00		1,00		3		100		
2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>			100.000		0		3.029		6.461		78.321		87.811		87,81	
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan kawasan pedesaan	1 produk hukum kawasan pedesaan		0		35		0,5		1		1		100		
		prosentase peningkatan kawasan pedesaan	75 %		0		35		50		75		75		100		
2.13.03.2.01	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>			100.000		0		3.029		6.461		78.321		87.811		87,81	
		<i>Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan</i>	1 produk hukum		0,00		35,00		-34,50		0,50		1		100		
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			100.000		0		3.029		6.461		78.321		87.811		87,81	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Produk Hukum Kawasan Pedesaan	1 Produk Hukum		0		35,00		15,00		-49,00		1		100		
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			2.843.967		407.984		527.939		503.164		787.416		2.226.502		78,29	
		Menurunnya Persentase desa yang bermasalah	20 persen		0		15		10		20		20		100		
		Terlaksananya Program Administrasi Pemerintahan Desa	14 produk hukum/ juknls		0		6		10		14		14		100		
2.13.04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>			2.843.967		407.984		527.939		503.164		787.416		2.226.502		78,29	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	14 produk hukum		0,00		6,00		4,00		4,00		14		100		
2.13.04.2.01.01	<b>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>			25.000		1.574		2.985		1.592		13.927		20.078		80,31	
		Jumlah Produk Hukum tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Produk Hukum		2		0,00		0		0		2		100		
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	1 kali		1		0,00		0		0		1		100		
2.13.04.2.01.02	<b>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</b>			75.000		4.102		6.542		23.793		30.322		64.759		86,34	
		Jumlah Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Produk Hukum		2		0,00		0		0		2		100		
		Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi penyusunannya	3 kali		2		-1,00		2,00		0		3		100		
2.13.04.2.01.03	<b>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</b>			10.000		655		183		3.590		80		4.508		45,08	
		Jumlah Produk Hukum tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Produk Hukum		0		1,00		0		1,00		2		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	2 desa		0		0,00		1,00		1,00		2		100		
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			213.121		8.159		8.125		42.480		137.867		196.631		92,26	
		Jumlah Produk Hukum tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	2 Produk Hukum		2		0,00		0		0		2		100		
		Jumlah aparat pemerintah desa yang mengikuti Bimtek tentang pengelolaan keuangan dan aset desa	123 orang		0		0,00		0		123,00		123		100		
		Jumlah aplikasi yang dikelola	2 aplikasi		2		0,00		1,00		-1,00		2		100		
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1.838.701		357.521		354.348		363.092		355.759		1.430.720		77,81	
		Jumlah Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terlaksana	123 desa		0		0,00		123,00		0		123		100		
		Jumlah aparat pemerintah desa yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	1018 orang		0		0,00		150,00		868,00		1018		100		
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			4.999		861		1.518		0		0		2.379		47,59	Belanja Sosialisasi tidak terserap di karenakan kegiatan tersebut di tahun 2022 Desa sudah melaksanakan Musdes sesuai dengan tahapan sehingga kegiatan yang berkaitan dengan makan minum tidak di realisasikan.
		Jumlah Produk Hukum tentang Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 Produk Hukum		1		1,00		0		0		2		100		
		Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan musyawarah desa (Musdes)	2 kali		1		0,00		1,00		-1,00		1		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4		5		6		7		8				11		
		Jumlah monitoring dan evaluasi hasil Musyawarah Desa (Musdes)	4 kali		1	0,00		1,00		0		2		50			
2.13.04.	2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		4.999		702		1.040		1.860		0		3.602	72,06		
		Jumlah produk hukum tentang evaluasi dan pengawsan peraturan desa	2 Produk Hukum		2	0,00		0		0		2		100			
		Jumlah pelaksanaan pengawasan dan evaluasi peraturan desa	1 kali		1	0,00		0		0		1		100			
2.13.04.	01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		100.000		2.000		20.810		16.144		31.376		70.330	70,33		
		Jumlah BUMDes yang terfasilitasi	9 Desa		29	0,00		0		-20,00		9		100			
		Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat dan infrastruktur desa	9 Desa		9	0,00		0		0		9		100			
2.13.04.2.	01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		40.000		21.683		4.010		0		12.170		37.863	94,66		
		Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	7 Desa		7	1,00		0		-1,00		7		100			
2.13.04.2.	1.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		40.000		3.568		-2.420		12.372		18.677		32.197	80,49		
		Jumlah produk hukum tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Produk Hukum		0	0,00		2,00		0		2		100			
		Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian dan pemberhentian perangkat desa	5 kali		0	2,00		1,00		2,00		5		100			
		Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pengangkatan/pemberhentian perangkat desa	5 kali		0	0,00		3,00		2,00		5		100			
2.13.04.2.	1.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		214.650		0		2.772		13.348		140.220		156.340	72,83		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa berdasarkan IDM, Prodeskel dan EPDeskel	132		132		0,00		0		0		132		100		
		Jumlah rapat fasilitasi pemutakhiran data profil dan evaluasi perkembangan desa	5 kali		8		0,00		0		-3,00		5		100		
		Jumlah monitoring dan evaluasi fasilitasi pemutakhiran data profil dan evaluasi perkembangan desa	18 kali		0		18,00		0		0		18		100		
2.13.04.	2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa		99.999		2.646		12.491		10.328		48.163		73.628		73,63	
		Jumlah Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	9 Kecamatan		9		0,00		0		0		9		100		
		Jumlah fasilitasi pencairan proposal Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan SK Gubernur dan Bupati	100 persen (%)		15		32,00		35,00		18,00		100		100		
2.13.04.2	01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		177.499		4.513		115.535		14.566		-1.145		133.469		75,19	
		Jumlah Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Kecamatan		9		0,00		0		0		9		100		
		Jumlah dokumen penetapan pemenang lomba desa	1 dokumen		0		1,00		0		0		1		100		
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		695.733		50.592		54.375		110.110		330.638		545.715		78,44	
		Persentase Meningkatnya kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	75 %		0		0		75		75		75		100		
		Jumlah kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat	0 0		0		0		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					i		II		III		IV						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		dan desa															
		Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	7 kegiatan		0		7		7		7		7		7		100
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			695.733		50.592		54.375		110.110		330.638		545.715			78,44
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 kegiatan		0,00		7,00		0		0		7				100
2.13.05.2.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			75.000		500		0		2.670		40.521		43.691			58,26
		Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1: kegiatan		0		1,00		0		0		1				100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					i		ii		iii		iv						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9 kali		0		2,00		7,00		0		9		100		
		Jumlah rapat dan monev penataan administrasi lembaga desa	9 kali		1		4,00		4,00		0		9		100		
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			75.000		0		8.887		10.997		42.075		61.959		82,61	
		Jumlah peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 kegiatan		0		1,00		0		0		1		100		
		Jumlah pembinaan Posyandu/Pemilihan Posyandu terbaik	9 Posyandu		0		0,00		9,00		0		9		100		
		Jumlah bimtek peningkatan kapasitas kader lembaga desa	123 orang		0		123,00		0		0		123		100		
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			1.000		0		0		0		0		0		0	Anggaran tidak mencukupi untuk maintenance sehingga desiminasi tidak bisa dilaksanakan
		Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	123 Desa		0		0,00		0		0		0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																
		Jumlah fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	123 Desa		0	0,00			0		0		0		0		0	
		Jumlah pembuatan/maintenance aplikasi kelmbagaan desa	2 aplikasi		0	0,00			0		0		0		0		0	
		Jumlah desiminasi informasi aplikasi kelembagaan desa	2 aplikasi		0	0,00			0		0		0		0		0	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			80.000		3.500		1.359		8.092		21.050		34.001		42,5	Adanya beberapa barang dengan indeks SSH yang tinggi sehingga sisa anggaran cukup besar meskipun volume terpenuhi ; beberapa kegiatan pelatihan / bintek menggunakan modul berupa softfile untuk efisiensi, sehingga anggaran penggandaan materi tidak di realisasikan : Adanya kegiatan yang rencananya dilaksanakan secara simultan di masing-masing Kecamatan, dilaksanakan secara terpadu dalam 1 kali pertemuan untuk	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		ii		III		IV								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						9=5+6+7+8	
1	2	3	4		5		6		7		8						11		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
																			efektivitas waktu, sehingga peserta yang hadir dikurangi menyesuaikan dengan kapasitas ruangan ; adanya pertemuan yang menggunakan ASB, dimana dalam ASB terdapat prosentase yang diatur dalam Perbup tentang ASB kurang luwes dengan SSH dan kebutuhan di lapangan, sehingga tidak bisa direalisasikan keseluruhan dan menjadikan sisa anggaran yang cukup besar ; adanya anggaran sewa gedung yang include dalam ASB sehingga sewa gedung yang direncanakan dalam DPA tidak dapat di realisasikan .
		Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	123 kali		20	20,00		20,00		63,00		123		100					
		Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	24 kali		20	0,00		0		4,00		24		100					



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah rapat koordinasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa	24 kali		20	0,00	0,00		0		4,00		24		100		
				30.000		0		5.257		0		18.728		23.985		79,95	
		Jumlah Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 kegiatan		0	0,00		1,00		0		1		100			
		Jumlah identifikasi / monitoring dan evaluasi teknologi tepat guna di desa	9 kali		0	0,00		9,00		0		9		100			
		Jumlah pembinaan posyantekdes	20 posyantek desa		0	0,00		15,00		5,00		20		100			
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			1.995		0		1.995		0		0		1.995		100	
		Jumlah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 kegiatan		1	0,00		0		0		1		100			
		Jumlah pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 lokasi		0	0,00		0		1,00		1		100			
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			432.739		46.592		36.877		88.352		208.264		380.084		87,83	
		Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	132 kali		10	122,00		0		0		132		100			
		Jumlah pembinaan PKK	5 kali		3	1,00		0		1,00		5		100			
		Jumlah lomba PKK	3 kali		1	0,00		0		2,00		3		100			
		Jumlah rapat pleno	12 kali		4	2,00		0		6,00		12		100			
		Jumlah rapat koordinasi	10 kali		6	1,00		0		3,00		10		100			
		Jumlah orientasi kader	1 kali		0	0,00		0		1,00		1		100			
<b>JUMLAH</b>				11.672.108		9.921.257				0		1,00		9.921.257			
<b>Rata - rata capaian kinerja OPD (%)</b>														<b>91,99</b>	<b>85</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Adanya kerjasama yang baik antar pengelola kegiatan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPPA yang di tandatangan dibulan Oktober membawa dampak pada jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mengakibatkan penyerapan tidak maksimal																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya mohon agar penuangan anggaran diperhitungkan dengan cermat agar hasil di akhir periode dapat terserap maksimal																	

Kudus, ..... 2022

Dievaluasi oleh,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, KABUPATEN KUDUS

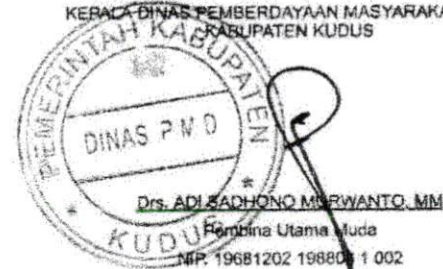


Drs. REVISIAN TO SUBEKTI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19860321-198603 1 006

Kudus, ..... 2022

Disusun oleh,

KERAC DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KUDUS



Drs. ADI LACHONO MURWANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681202 198803 1 002

## Form E.70

## Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Perangkat Daerah:

No	Uraian	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.		✓		ditengahi SK & Agenda Kerja.
2.	Pengolahan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.		✓		ditengahi ev renja th IV th 2022
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		✓		
9.	Perumusan kegiatan prioritas.		✓		
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten		✓		
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓		
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati.	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah	✓			

No	Uraian	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disyahkan		√		Mengerti


Kudus,

2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

  
Drs. REVLISANTO SUBEKTI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660321 198603 1 006

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA

  
Drs. ADI SADHONO MURWANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681202 198603 1 002

**TELAH DIVERIFIKASI**

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris	
2.	Kepala Bidang	
3.	Kasubbid/Subkoordinator	
4.	MitraPD	